

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia dewasa ini selalu mengalami peningkatan dalam berbagai aspek, salah satunya dalam bidang perekonomiannya. Setelah sempat anjlok pada tahun 1998 karena adanya reformasi perlahan-lahan perekonomian di Indonesia mulai di benahi sehingga dapat berkembang. Pembenahan dalam bidang perekonomian bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Dalam pembenahan ini tentu saja pemerintah akan melakukan pembangunan ekonomi, pembangunan ini dapat dalam bentuk infrastruktur penunjang kemajuan perekonomian, pendidikan, kesehatan, kebijakan-kebijakan yang menyangkut tentang perekonomian di Indonesia dan masih banyak lagi.

Di Indonesia saat ini terdapat 3 pelaku ekonomi yang sangat berperan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi yaitu Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Ketiga pelaku ekonomi tersebut diharapkan dapat berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di Indonesia, sehingga cita-cita bangsa dapat tercapai yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Ditinjau dari tata susunan perekonomian yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat ( 1 ), yaitu **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”**.

Lebih lanjut dalam penjelasannya, dikatakan bahwa demokrasi ekonomi ini adalah perekonomian yang dikerjakan oleh masyarakat, dipimpin oleh

anggota-anggota masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu bentuk perusahaan yang sesuai dengan arah pembangunan ekonomi nasional adalah koperasi.

Pengertian koperasi ini dapat kita lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, BAB I, Pasal 1 ayat 1 bahwa:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi seklaigus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”**

Dari definisi diatas dapat diartikan koperasi sebagai suatu badan usaha yang mempunyai anggota yang terdiri dari orang atau badan hukum yang bisa memanfaatkan peluang-peluang serta sumber potensi yang ada untuk dapat diusahakan seefisien mungkin. Sehingga dengannya koperasi dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik. Dengan demikian, koperasi mampu menjadi sebuah gerakan usaha yang berswadaya dan mandiri dimana setiap anggotanya dituntut berperan aktif dalam segala kegiatan usaha yang ada di koperasi.

Adapun tujuan dari koperasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia no.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Bab II, Pasal 3 menyatakan bahwa:

**“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”**

Koperasi sebagai salah satu badan usaha ekonomi akan selalu berhubungan dengan suatu aktifitas yang menyangkut kegiatan ekonomi. Oleh karena itu koperasi mempunyai kedudukan sebagai soko guru perekonomian

nasional yang mengandung pengertian bahwa koperasi harus mampu berperan sebagai penopang utama ekonomi nasional. Dengan demikian koperasi harus mampu memberikan sumbangan dominan serta peran nyata dan strategis dalam kegiatan produksi, pengelolaan dan pemasaran. Karenanya pembinaan dan pengembangan koperasi merupakan langkah nyata untuk mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan koperasi.

Mengenai fungsi dan peran koperasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab III pasal 4 yakni sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperoleh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dari fungsi dan peran koperasi di atas, menunjukkan bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang harus dapat memperjuangkan, membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Walaupun demikian, koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya itu perlu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) serta pendapatan pada tingkat tertentu. Bila hal ini telah berhasil dicapai, maka koperasi tersebut dapat dikatakan baik.

Subandi (2009:35-37) mengelompokan jenis-jenis koperasi berdasarkan hal-hal berikut:

1. Berdasarkan bidang usahanya: Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Kredit/Simpan Pinjam.
2. Berdasarkan jenis Komoditinya: Koperasi Ekstraktif, Koperasi Pertanian dan Peternakan, Koperasi Industri dan Kerajinan, dan Koperasi Jasa-jasa.
3. Berdasarkan Profesi Anggotanya: Koperasi Karyawan, Koperasi Pegawai Negeri Sipil, Koperasi Angkatan Darat, laut, udara, dan Polri, Koperasi Mahasiswa, Koperasi Pedagang pasar, Koperasi Veteran RI, Koperasi Nelayan, dan Koperasi kerajinan dan sebagainya.
4. Berdasarkan daerah kerjanya; Koperasi Primer, Koperasi Pusat, Koperasi Gabungan, dan Koperasi Induk.

Dari uraian di atas Koperasi Karyawan Republik Indonesia Korps Pegawai Kesehata Sumedang (KPRI-KPKS) termasuk kedalam Koperasi Pegawai Negeri Sipil. KPRI-KPKS merupakan koperasi pegawai yang beralamat di Jalan. Pangeran Geusan Ulun No.75 Reggol Wetan, Sumedang Selatan, Kota Kulon, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45311. KPRI-KPKS pada tahun 2017 memiliki anggota sejumlah 1954. Dengan berbagai usaha yang meliputi usaha simpan pinjam, fotocopy, waserda, penyewaan barang, penyewaan gedung serba guna. Dana yang ada pada KPRI-KPKS tersebut seluruhnya bersumber dari para anggotanya, koperasi tidak menggunakan dana pinjaman dalam menggerakkan usahanya. Dana-dana yang telah terkumpul kemudian disalurkan kembali kepada para anggotanya ataupun untuk menggerakkan bidang usaha lainnya. Dalam proses pengelolaan modal tersebut, berbagai rasio keuangan digunakan untuk menilai atau mengukur efisiensi penggunaan modal dalam koperasi yang bersangkutan. Salah satunya adalah melalui tingkat rasio profitabilitas, rasio ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu. Profitabilitas ini diukur dengan menggunakan *ROE (Return On*

*Equity*) atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri (Kasmir,2008)

Berikut merupakan tabel yang menjelaskan perkembangan modal sendiri maupun perkembangan selisi hasil udaha setelah pajak serta perhitungan *ROE* (*Return On Equity*):

**Tabel 1.1: Perkembangan SHU Setelah Pajak, Ekuitas, dan ROE KPRI KPKS Periode 2013 s.d. 2017**

Tahun	SHU Setelah Pajak	N/T %	Ekuitas	N/T %	ROE %
2013	Rp216.856.145	-	Rp12.788.785.587	-	1,70
2014	Rp464.641.228	114,26	Rp14.280.209.702	11,66	3,25
2015	Rp614.363.191	32,22	Rp16.327.542.336	14,34	3,76
2016	Rp714.064.783	16,23	Rp18.724.906.528	14,68	3,81
2017	Rp900.245.205	26,07	Rp21.011.191.147	12,21	4,28

**Sumber: Laporan Keuangan Periode 2013 s.d. 2017, diolah**

Dari tabel 1.1,dapat dikatakan bahwa perkembangan SHU Setelah Pajak pada KPRI-KPKS dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 114,26% dari tahun 2013 dengan jumlah SHU sebesar Rp. 464.641.228. kemudian pada tahun 2015 SHU menjadi sebesar Rp. 614.363.191 dengan presentase perkembangan sebesar 32,22%. Pada tahunn 2016 SHU sebesar Rp. 714.064.783 dengan presentase perkembangan sebesar 16,23%, dan pada tahun 2017 SHU menjadi sebesar Rp. 900.245.205 dengan presentase perkembangan sebesar 26,07%.

Kenaikan tersebut berbanding lurus dengan tingkat perkembangan profitabilitasnya dengan menggunakan perhitungan *ROE* (*Return On Equity*). Pada tahun 2013 tingkat pengembalian investasi sebesar 1,70%. Kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar 3,25%. Pada tahun 2015 masih terjadi peningkatan sehingga pengembalian investasi sebesar 3,76%.

Kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 3,81%. Pada 2017 mengalami kenaikan sehingga menjadi sebesar 4,28%.

Jumingan (2005:229) mengungkapkan bahwa semakin tingginya rasio rentabilitas (profitabilitas) ini akan semakin baik. Dikutip juga dari Kasmir (2008:204) semakin tinggi Rasio Profitabilitas, maka makin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

Dibawah ini ditampilkan daftar rasio standar produktifitas Koperasi berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/per/M.KUKM/V/2006 pedoman penilaian koperasi berprestasi/koperasi award adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2: Daftar Rasio Standar Produktifitas Koperasi**

Jenis Rasio	Standar	Kriteria
Return On Equity	>21%	Sehat
	15% s/d <21%	Cukup Sehat
	9% s/d <15%	Kurang Sehat
	3% s/d <9%	Tidak Sehat
	<3%	Sangat Tidak Sehat

**Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006**

Apabila mengacu pada standar diatas, maka *Return On Equity* pada KPRI-KPKS pada tahun 2013 sebesar 1,70% berada di posisi sangat tidak sehat. Kemudian pada tahun 2014 sebesar 3,25% berada di posisi tidak sehat, pun dengan tahun 2015, 2016, 2017 yang berturut-turut presentase *ROE* sebesar 3,76%, 3,81%, 4,28% juga berada pada posisi tidak sehat.

Dilihat dari penjelasan diatas bahwa kemampuan KPRI KPKS dalam memperoleh SHU dari modal sendiri yang dimiliki memang terus mengalami perkembangan dalam 5 tahun terakhir, namun jika mengacu pada Peraturan Menteri

Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/MKUKM/V/2006 dapat dikatakan bahwa koperasi mengalami inefisien. Ketidak efisienan koperasi berakibat salah satunya adalah keuntungan yang sedikit akan berdampak pada manfaat langsung yang akan dinikmati anggota menjadi sangat minimal.

Menurut Cornett, Adrair dan Nofsinger (2009) ROE bersama-sama dengan *Profit Margin*, *Total Asset Turnover*, dan *Debt to Equity Ratio* akan berpengaruh terhadap *Sustainable Growth Rate* (SGR). ROE merupakan faktor utama dalam menentukan *Sustainable Growth Rate* (SGR), karena secara matematis tingkat pertumbuhan berkelanjutan (*Sustainable Growth Rate*) dapat dihitung dengan  $(ROE \times b) / 1 - (ROE \times b)$ , dimana ROE adalah *return on equity* dan b adalah presentase laba yang ditahan (Ross dan Jordan 2000;103)..

Tingkat pertumbuhan laba yang ditentukan dengan kemampuan keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*internal growth rate*) dan tingkat pertumbuhan berkesinambungan (*sustainable growth rate*) (Achmad 2005).

*Internal growth* adalah pertumbuhan dengan memanfaatkan pendanaan internal (*internal financing*), sedangkan *sustainable growth* adalah pertumbuhan berkelanjutan tanpa mengubah kebijakan-kebijakan keuangan koperasi (Achmad 2005). Dalam menghitung tingkat pertumbuhan internal dan tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan diperlukan *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) untuk mengevaluasi kemampuan koperasi untuk tumbuh dan untuk memaksimalkan nilai pasar.

Sebuah masalah muncul ketika suatu koperasi hanya bergantung pada dana internal untuk mendukung pertumbuhan assetnya. Rasio hutang akan jatuh karena

nilai aset yang tumbuh, total hutang tetap konstan hanya laba ditahan yang bisa meningkatkan pertumbuhan aset keuangan. Jika total hutang tetap konstan dan hanya aset yang tumbuh, maka rasio hutang akan menurun. Jika koperasi ingin tumbuh secara optimal maka manajer harus menggunakan rasio pinjaman agar terjadi keseimbangan antara aset dan hutang karena koperasi yang memiliki pinjaman tidak selalu dianggap tidak baik dan sebaliknya koperasi yang tidak memiliki pinjaman dianggap baik. Koperasi yang memiliki pinjaman hutang membuktikan bahwa koperasi tersebut dapat dipercaya oleh pihak lain untuk memperoleh pinjaman dana dari pihak lain. Berikut ini adalah perbandingan modal sendiri koperasi dengan modal asing KPRI KPKS 2013-2017 :

**Tabel 1.3 Perkembangan Total Modal, Modal Pinjaman Asing, Modal Anggota, Modal Koperasi KPRI KPKS Tahun 2013-2017**

Tahun	Total Modal (Rp)	Modal Pinjaman Asing (Rp)	Presentase terhadap TM (%)	Modal Anggota (Rp)	Presentase terhadap TM (%)	Modal Sendiri (Rp)	Presentase terhadap TM (%)
2013	22.709.408.517	4.554.972	0,02	9.916.127.958	43,66	12.788.785.587	56,32
2014	25.031.618.631	8.823.445	0,04	10.742.585.484	42,91	14.280.209.702	57,05
2015	27.976.517.052	10.547.289	0,04	11.638.427.427	41,60	16.327.542.336	58,36
2016	31.095.179.958	14.980.690	0,05	12.355.292.740	39,73	18.724.906.528	60,22
2017	33.335.219.498	15.588.013	0,05	12.308.440.338	36,92	21.011.191.147	63,03
Rata-rata	28.029.588.731	10.898.882	0,04	11.392.174.789	40,96	16.626.527.060	58,99

Sumber : Hasil Penelitian, diolah

Dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa mayoritas modal koperasi berasal dari Modal sendiri koperasi, sedangkan modal pinjaman pun kebanyakan berasal dari simpanan-simpanan anggota. Sedangkan modal pinjaman dari asing sangat kecil rata-rata hanya sebesar 0,04%.

Untuk dapat memaksimalkan tingkat pertumbuhan bisa dilakukan dengan pendekatan *Sustainable Growth Rate* (SGR). Memaksimalkan *Sustainable Growth Rate* (SGR) bisa membantu manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan dengan menggunakan *Dupont ROE*.



Menurut Cornett, Adrair dan Nofsinger (2009;91) *notice that a firm's suistanable growth depends on four factors:*

1. *The Profit Margin (operating efficiency)*
2. *The total asset turnover (efficiency in asset use)*
3. *Financial leverage (the use of debt versus equity to finance assets)*
4. *Profit retention (reinvestment of net income into the firm rather than puying it out devidends.*

Noor Achmad (2005) menjelaskan bahwa dengan menjaga SGR maka akan menjaga kepercayaan investor. Jika di intrepretasikan ke dalam koperasi maka dengan menjaga tingkat SGR ini akan membuat anggota percaya dan meningkatkan transaksinya dengan koperasi, dengan meningkatnya partisipasi anggota maka akan berdampak pula pada return yang nantinya akan diterima oleh koperasi karena naiknya tingkat penjualan. Hal lain yang akan terjadi jika tingkat partisipasi anggota meningkat adalah manfaat ekonomi yang akan diperoleh anggota juga akan meningkat baik itu manfaat ekonomi tidak langsung (SHU) maupun manfaat ekonomi langsung (selisih harga dengan non koperasi. Peningkatan yang terjadi pada *Return On Equity* (ROE) tentu akan berdampak pada peningkatan dari *Sustainable Growth Rate* (SGR).

Mencermati kondisi KPRI KPKS dengan perhitungan *Return On Equity* (ROE) yang tidak efisien yang diduga disebabkan oleh banyak faktor akan berpengaruh terhadap *Suistanable Growth Rate* (SGR) dan untuk mengetahui seberapa besar manfaat ekonomi yang diberikan oleh KPRI KPKS kepada anggotanya. Oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan pada pertumbuhan *Return On Equity* (ROE) dan *Suistanable Growth Rate* (SGR) dan manfaat ekonomi bagi anggota, maka judul dari penelitian ini adalah “**Analisis Pertumbuhan Return On Equity (ROE) dan Suistanable Growth Rate (SGR) serta Kaitannya**

**dengan Manfaat Ekonomi Bagi Anggota (studi kasus pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Korps Pegawai Kesehatan Sumedang)”.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan mengacu pada kepada judul yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan *Profit Margin*, *total aset turnover*, *debt to equity*, dan *retention rate* sebagai faktor-faktor yang menentukan *return on equity* (ROE) dan *sustainable growth rate* (SGR) pada KPRI KPKS.
2. Bagaimana perkembangan *sustainable growth rate* (SGR) pada KPRI KPKS selama 5 tahun terakhir.
3. Bagaimana kaitan perkembangan *return on equity* (ROE) dan *sustainable growth rate* (SGR) dengan manfaat ekonomi anggota pada KPRI KPKS.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan mengenai perkembangan *Return On Equity* (ROE) dan *Sustainable Growth Rate* (SGR) dan faktor-faktor yang mempengaruhi *Return On Equity* (ROE) dan *Sustainable Growth Rate* (SGR) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Korps Pegawai Kesehatan Kabupaten Sumedang (KPRI KPKS) serta manfaat ekonomi bagi anggota.

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui

1. Perkembangan *Profit Margin*, *Total Asset Turnover*, *Debt to Equity*, dan *Retention Rate* sebagai faktor-faktor yang menentukan *Return On Equity* (ROE) dan *Sustainable Growth Rate* (SGR) pada KPRI KPKS.
2. Perkembangan *Sustainable Growth Rate* (SGR) pada KPRI KPKS.
3. Kaitan perkembangan *Return On Equity* (ROE) dan *Sustainable Growth Rate* (SGR) dengan manfaat ekonomi anggota pada KPRI KPKS.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aspek pengembangan keilmuan maupun aspek guna laksana, diantaranya :

1. Aspek Guna Laksana :

Pengurus dan pengelola koperasi sebagai bahan informasi yang bermanfaat dalam mempertimbangkan dan menetapkan kebijakan dalam mengambil keputusan.

2. Aspek Pengembangan Ilmu

- a. Peneliti, sebagai acuan untuk menilai sejauhmana kemampuan dalam meneliti, menelaah serta menganalisis suatu masalah dan bagaimana cara untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan ilmu yang telah diperoleh.

- b. Peneliti lain, sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam.

### **1.5 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Korps Pegawai Kesehatan Kabupaten Sumedang yang beralamatkan di Jl. Pangeran Geusan Ulun No. 75, Regol Wetan, Sumedang Selatan, Kotakulon, Sumedangsel., Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45311.



**IKOPIN**